

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir, Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Akbar, Patrialis. *Lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Anonim, *Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia* (Septa Karsa Utama). Jakarta: Arloka, 2006
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly dan Mustafa Fakhri, *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,” (makalah disampaikan pada Workshop tentang Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi Implementasi MOU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Penyelenggaraan Pemilukada Aceh 2011 yang Aman, Tertib dan Damai, di Jakarta, Kamis, 8 Desember 2011).
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Burso, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Estiko, Didit Hariadi dan Suhartono, *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, Jakarta: P31 Sekretariat Jendral DPR RI, Agrarino Abadi, 2003.
- Gultom, Lodewijk. *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2007.
- Handayani, Irma. Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No1/MKMKSP/II/2017).
- Hasani, Ismail. *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013.
- Huda, Ni'matul, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
- Huda, Ni'matul dan R. Nazriyah., *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI*, Jakarta: Leip-MA, 2003.

- Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Cetakan ke-11*, Jakarta, Kencana, 2011.
- MD, Mahfud, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia, 1988.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Pramudya, Kelik. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Laporan Penelitian Pengawasan terhadap Integritas Hakim Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018.
- Saleh, Imam Anshori. *Kandasnya Perppu dan Masa Depan MK*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2014.
- Sekretariat Jenderal MPR, *Risalah Rapat Ke-3 Panitia Ad Hoc I BP MPR Tahun 1999*, Senin 6 Desember 1999.
- Siahaan, Maruaar. *Hukum Acara Mahkamah Knstitusi Republik Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sirajudin dan Zulkarnain. *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soimin dan Masyurinto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Usman, Suparman. *Filsafat Hukum dan Etika Profesi*, Banten: Suhud Sentra Utama, 2002.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Semarang: Mimbar, 2000.
- Zubair, Ahmad Charis, *Kuliah Etika*, Jakarta: Rajawali Pers, 1980.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK-SPP/II/2017.

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK-/T/02/2023.

JURNAL DAN SKRIPSI

Darmadi, Nanang Sri, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2019.

Disantara, Fradhana Putra, dkk, “Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Gagasan Constitutional Ethics”, *Jurnal Litigasi (e-journal)*, Volume 24, 2023.

Handayani, Irma. “Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No1/MKMKSP/II/2017”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Hidayat, Arief, Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi 2015-2019, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi)

Jurdi, Fajlurahhman, Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-50*, 2020.

- Kapitan, Rian Van Faris, “Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Volume 44 Nomor 4*, 2015.
- Kiss, Mate Jenó, Gertrud Wayda, Istvan Bereczki, dan Levente Simon, “Judicial Ethical Values and Their Enforcement,” Themis Competition 2016-Semifinal D: Judicial Ethics and Professional Conduct.
- Lailam, Tanto, “Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 4, Jakarta, 2016.
- Malik, “Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 10 No. 4, Desember 2013.
- Malik, Abdul. “Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUndang-Undang-IV/2006”, *Jurnal Konstitusi, Volume 6*, 2008.
- Muhtadi, "Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi", Fakultas Hukum, Universitas Lampung, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 3*, 2015.
- Nasution, Mirza dan Nazaruddin. “Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)” Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 3, 2018.
- Nasution, Faisal Akbar. “Hak Imunitas Anggota DPR RI Sebagai Pejabat Publik dalam hal menjalankan Tugas dan Wewenangnya”. *Jurnal Ilmiah Penegakanh Hukum*, Vol. 8 No.1, Juni 2021.
- Nawas, Abu. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Iblam Law Vol 1 No 2* 2021.
- Riza. Pengawasan terhadap Integritas Hakim Konsitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2018.
- Safiudin, Achmad. Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Sifayah. Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2016.
- Samud, “Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Mahkamah*, Vol.9 No.1 Januari-Juni 2015.
- Shinta, Citra Yama. “Etika Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Menjalankan Fungsi Kelembagaan”, *Skripsi, Yogyakarta: UIN Kalijaga Yogyakarta*, 2019.
- Simonis, Mindaugas. “The Role of Judicial Ethics in Court Administration: From Setting the Objectives to Practical Implementation,” *Baltic Journal of Law & Politics* Volume 10 Nomor 1, 2017.
- Sorik, Sutan. Mirza Nasution dan Nazaruddin, “Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.15 No.3 September 2018.
- Suparto, “The Comparison *Between* the Judicial Commission of the Republik of Indonesia and the Netherlands Council for the Judiciary”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 06 No. 01 (2019).

- Sutiyoso, Bambang, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*, Vol.7 no.2 Februari 2010.
- Syahayani, Zihan. Pembaharuan Hukum dalam Sistem Seleksi dan Pengawasan Hakim Konstitusi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.2014.
- Tutik, Titik Triwulan. “Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 2 (Mei 2012).
- Wiryanto, “Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 13 No. 4, Desember 2016.
- Zahra, Rabiatul Adawiah. “Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Etik Dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

BERITA DAN INTERNET

- Ali, Undang-Undang MK Teranyar Larangan Ultra Petita, 2011, <http://satu.Hukumonline.Com/berita/baca/lt4df77782a57eb/Undang-Undang-mk-teranyar-larang-iultra-petitai>, Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2023.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Arti Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etika>
- FHUII Blog, “Sistem Pengawasan dan Kode Etik Hakim Konstitusi,” <https://fh.uui.ac.id/blog/2011/03/21/sistem-pengawasan-kode-etik-hakim-konstitusi/>, diakses 14 Maret 2024.
- Lingkar Survey Indonesia, “Robohnya MK kami,” <http://lsi.co.id/lsi/wp-content/uploads/2013/10/Materi-Konpers-Minggu-6-Oktober2013-Robohnya-MK-kami.pdf>, diakses pada 19 Maret 2024.
- Mantalean, Vitorio, “Hakim Konstitusi Guntur Hamzah Terbukti Langgar Etik Ubah Pundang- Undangsan”, Kompas.com, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/20/17135661/hakim-konstitusi-guntur-hamzahterbukti-langgar-etik-ubah-putusan> pada tanggal 3 Desember 2023
- Susana Rita Kumalasanti, “Terbukti Ubah Keputusan Mk Guntur Hamzah dijatuhi Sanksi Teguran Tertulis”, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/20>. Diakses pada 7 Mei 2024.
- Tamanaha, Brian Z. dan Ibrahim, “Independensi dan Akuntabilitas Hakim,” http://satu.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/UMUM01/UMUM01_IBRAHIM_KEPPH.pdf, diakses 14 Maret 2024.